

Sulteng dan Jerman Perkuat Kerja Sama Ekonomi Berkelanjutan

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka peluang kerja sama strategis dengan Pemerintah Jerman dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, hingga pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menerima kunjungan kerja Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (26/08/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Reny didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Rudi Dewanto, S.E., M.M., serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Wagub Reny menyampaikan bahwa kunjungan Kedutaan Besar Jerman

menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pengelolaan sumber daya alam Sulawesi Tengah.

“Insya Allah kita akan membangun kerja sama di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun perikanan. Sulawesi Tengah memiliki potensi yang besar dan membutuhkan kolaborasi untuk mengembangkan potensi tersebut secara berkelanjutan,” ujar Wagub.

Baca **KERJA SAMA** Hal. 7



WAKIL GUBERNUR Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menerima kunjungan kerja Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (26/08/2026). **FOTO: BIRO ADPIM**

KODIM 1311 MOROWALI

Siap Bangun Panti Asuhan untuk Anak Yatim



KOMANDAN Kodim (Dandim) Morowali, Letkol Inf. Boyke Baja Imanuel Sirait saat Silaturahmi bersama insan Jurnalis Kabupaten Morowali Utara, Kamis (27/8/2026). **FOTO: IST**

SULTENG RAYA - Dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial dan memperkuat sinergi dengan masyarakat, Komando Distrik Militer (Kodim) 1311 Morowali berencana membangun sebuah panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

Baca **KODIM 1311** Hal. 7

SOLIDARITAS DI TENGAH BANJIR

PT SPS dan KADIN Parigi Moutong Salurkan Bantuan untuk Warga Avolua



KETUA KADIN Parigi Moutong, Faradiba Zaenong (kedua dari kiri) menyerahkan secara simbolis bantuan logistik kepada warga korban banjir di Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara, Kamis (27/8/2026). **FOTO: ASLAN LAEHO**

SULTENG RAYA - Di tengah lumpur dan material banjir yang masih menyisakan pekerjaan panjang bagi warga Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, kepedulian dari berbagai pihak mulai berdatangan.

Baca **SOLIDARITAS** Hal. 7

Pemprov Sulteng: Kelangkaan BBM di Palu Telah Teratasi



KENDARAAN roda dua maupun roda empat antri mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU jalan Touwa Kota Palu pada Kamis (20/8/2026) malam. **FOTO: ANTARA/ANDRI**

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertalite, telah teratasi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palu.

“Kami telah melaksanakan pertemuan bersama pihak Pertamina, untuk menjaga ketersediaan BBM, khususnya Pertalite,” Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng Rudi Dewanto di Palu, Kamis.

Kata dia, Gubernur Sulteng meminta agar persoalan tersebut segera dicarikan solusi konkret, sehingga kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan kondisi

di lapangan kembali normal. Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina menjelaskan bahwa keterlambatan pasokan Pertalite dipengaruhi kondisi cuaca buruk yang berdampak pada perjalanan kapal pengangkut BBM dari Bitung, Sulawesi Utara, sekitar 15 Agustus 2026.

Baca **PEM PROV** Hal. 7

Pemprov Dorong Industrialisasi Kakao di Sulteng

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong industrialisasi komoditas kakao, untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani yang pada akhirnya memberikan peningkatan ekonomi.

“Kami sangat membutuhkan investor untuk membangun industri hilirisasi kakao di Sulteng,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng Muhammad Neng di Palu, Rabu.

Pemprov Sulteng mencatat produksi komoditas kakao tahun 2025 mencapai angka 126.516 ton. Kata dia, komoditas kakao merupakan salah satu komoditas



SEORANG petani memperlihatkan hasil panen buah kakao. **FOTO: ANTARA/LPEI**

perkebunan strategis yang perlu terus diperkuat, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga kualitas, kapasitas petani, pembiayaan, dan nilai tambah.

Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah penghasil kakao terbesar di Sulteng dengan produksi 29.683 ton atau sekitar 23,46 persen. Kemudian, Kabupaten Poso dengan produksi 22.486 ton, Donggala 17.838 ton, Sigi 17.524 ton, dan Banggai 16.621 ton.

Selanjutnya, produksi kakao di Morowali Utara tercatat 8.158 ton, Tolitoli 7.521 ton, Buol 3.567 ton,

Baca **KAKAO** Hal. 7

Kelompok Tani Binaan IMIP Olah Sampah Organik Jadi Bernilai

SULTENG RAYA - PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus mendorong praktik ekonomi sirkular dalam setiap operasionalnya. Salah satunya dengan mendorong transformasi pengelolaan sampah dan limbah menjadi produk bernilai rupiah.

Saat ini, IMIP memberda-

yakan masyarakat sekitar kawasan yang tergabung dalam Kelompok Tani Alam Terpadu Desa Le-le, Kecamatan Bahodopi melalui program Pengolahan Sampah Organik Terintegrasi dengan Pertanian (PESONA TANI).

Perusahaan pengelola kawasan industri terin-



PT IMIP melakukan pengelolaan sampah dan limbah menjadi produk bernilai rupiah. **FOTO: DOK. IMIP**

tegrasi berbasis mineral nikel ini mendukung melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pendam-

pingan. Tak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penguatan administrasi dan pencatatan

produksi agar aktivitas kelompok dapat dikelola

Baca **KELOMPOK** Hal. 7

Polsek Banawa Gencarkan Sosialisasi Cegah Karhutla

SULTENG RAYA - Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, Polsek Banawa terus menggencarkan sosialisasi Maklumat Kapolda Sulawesi Tengah kepada masyarakat di wilayah hukumnya, Kamis (27/8/2026).

Bhabinkamtibmas Polsek Banawa, Aiptu Sofyan Sandi, mengimbau aparat pemerintah di wilayah Kelurahan Labuan Bajo, Kelurahan Boneoge, Kelurahan Ganti, dan Kelurahan Boya agar bersama-sama dengan perangkat kelurahan/desa hingga tingkat RT turut menyosialisasikan Maklumat Kapolda Sulawesi Tengah kepada masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dalam kegiatan membuka lahan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

“Tindakan tersebut tidak hanya dapat membahayakan lingkungan dan merugikan masyarakat luas, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain memberikan imbauan secara langsung, personel Polsek Banawa juga melakukan pemasangan Maklumat Kapolda Sulawesi Tengah di sejumlah tempat keramaian dan fasilitas umum agar mudah diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi turut diperluas melalui media

sosial sebagai upaya meningkatkan jangkauan informasi dan kesadaran masyarakat.

Seluruh Bhabinkamtibmas juga diarahkan untuk melaksanakan sosialisasi secara aktif di kelurahan dan desa binaan masing-masing serta melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui grup WhatsApp Bhabinkamtibmas.

Terpisah, Kapolsek Banawa, Iptu Eka Wahyudi, menegaskan bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan peran dan kerja sama seluruh pihak.

“Di tengah musim kemarau yang berkepanjangan seperti saat ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk apa pun.

Pencegahan harus dilakukan bersama-sama karena dampak Karhutla bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi dapat merugikan masyarakat secara luas,” tegas kapolsek.

Ia juga mengharapkan peran aktif pemerintah kelurahan/desa, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus mengingatkan warga agar mematuhi Maklumat Kapolda Sulawesi Tengah.

“Apabila masyarakat mengetahui adanya aktivitas pembakaran hutan atau lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” tambahnya. **AMR**



BHABINKAMTIBMAS Polsek Banawa, Aiptu Sofyan Sandi, saat melaksanakan sosialisasi cegah karhutla kepada masyarakat di Kelurahan Labuan Bajo, Kamis (27/8/2026). **FOTO:** IST

Polwan Polda Sulteng Gelar Anjangsana dan Berbagi

SULTENG RAYA - Menjelang Hari Jadi Polwan (HJP) Republik Indonesia ke-78, jajaran Polisi Wanita Polda Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan anjangsana dan silaturahmi kepada Polwan purnawirawan serta Polwan yang mengalami sakit menahun, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni kediaman Kompol (Purn) Maryam di Jalan Tanggul, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, serta kediaman Aipda Ni Luh Yulianti di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Anjangsana tersebut diikuti oleh sejumlah Polwan Polda Sulteng bersama para Polwan purnawirawan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan perhatian dan

kepedulian kepada para senior Polwan yang telah mengabdikan diri kepada institusi Polri, serta kepada personel Polwan yang sedang menghadapi kondisi kesehatan.

Perwira Kordinator (Pakor) Polwan Polda Sulteng Kompol Nurhayati, menyampaikan anjangsana merupakan wujud kepedulian dan penghargaan Polwan Polda Sulteng kepada para senior yang telah memberikan pengabdian bagi institusi Polri, sekaligus bentuk perhatian kepada personel yang sedang mengalami sakit.

“Melalui kegiatan anjangsana ini, kami ingin terus menjaga tali silaturahmi dan kekeluargaan. Para purnawirawan merupakan bagian penting dari perjalanan Polwan, sementara kepada rekan kami yang sedang sa-

kit, kami ingin memberikan dukungan moril agar tetap semangat dan diberikan kesehatan,” ujar Nurhayati.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut Nurhayati rombongan melaksanakan silaturahmi dan ramah tamah, serta menyerahkan bingkisan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan.

Selain itu, turut dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang meliputi pengecekan tanda-tanda vital (TTV), pemeriksaan laboratorium sederhana, serta pemeriksaan dan fisioterapi oleh tenaga ahli terapis.

“Kehadiran para Polwan diharapkan dapat memberikan dukungan moril serta memperkuat rasa kebersamaan antara Polwan yang masih aktif berdinan dengan para senior dan personel yang tengah mengalami sakit,” ungkapnya. **AMR**



SEJUMLAH Polwan Polda Sulteng, saat melaksanakan anjangsana kepada purnawirawan Polwan, dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan, Rabu (26/8/2026). **FOTO:** HUMAS POLDA SULTENG



TERSANGKA kasus pembunuhan satu keluarga, Aan Kurniawan, saat memperagakan salah satu adegan sebelum dirinya menganiaya satu keluarga hingga tewas pada pra rekonstruksi yang digelar Polresta Palu, Kamis (27/8/2026). **FOTO:** HUMAS POLRESTA PALU

PEMBUNUHAN DI DUYU

Usai Penangkapan Tersangka, Polisi Gelar Pra Rekonstruksi

SULTENG RAYA - Sehari usai penangkapan tersangka pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Palu, menggelar pra rekonstruksi kasus tersebut, yang berlangsung di (TKP (tempat kejadian perkara) atau atau di rumah penjualan ayam potong Jalan Sungai Manonda, Lorong PDAM, Kamis (27/8/2026). Tersangka Aan Kurniawan memperagakan tahapan sebelum, hingga setelah aksi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Pra rekonstruksi dipimpin Wakapolresta Palu AKBP Muhammad Ilham, S.H. S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail, S.H., M.H. Dalam sejumlah adegan, tersangka awalnya

terlibat cekkock dengan korban. Tersangka kemudian menahan korban bersama istrinya yang saat itu menggunakan sepeda motor di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara.

Setelah kejadian tersebut, tersangka kembali menuju rumah korban. Ia disebut sempat mencoba masuk melalui pagar bagian depan, namun upaya itu tidak berhasil. Tersangka kemudian mencari akses lain dan masuk melalui bagian belakang rumah sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban.

Wakapolresta mengatakan, pra rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui secara rinci rangkaian tindakan tersangka saat menjalankan aksinya. “Pra rekonstruksi ini untuk mengetahui tahapan-tahapan yang

dilakukan tersangka, mulai dari awal bagaimana dia masuk sampai melakukan tindak pidana dan kembali setelahnya,” kata Ilham.

Ia menjelaskan, jumlah adegan dalam pra rekonstruksi masih akan dikaji, nanti akan rekonstruksi kembali yang hadir dari pihak kejaksaan, pengacara dengan pihak penyidik.

Polresta Palu melibatkan personel Sabhara Polda Sulteng, Brimob, Polsek Palu Selatan, Polsek Palu Barat, Bhabinkamtibmas serta sejumlah pejabat utama Polresta Palu. Mengenai motif, polisi sementara menggali keterangan tersangka yang mengaku sakit hati kepada korban. Sementara itu, polisi mengamankan satu sebilah pisau yang diduga digunakan tersangka dalam penganiayaan tersebut. **AMR**

PLN Siap Dukung Akselerasi Pengembangan EBT Menuju Swasembada Energi

SULTENG RAYA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sekaligus melakukan groundbreaking proyek-proyek yang siap menjadi akselerator Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026). Pada tahap awal, program tersebut mencakup 14 proyek PLTS berkapasitas total 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan implementasi mewujudkan asta cita swasembada energi dan hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah melalui pemanfaatan EBT.

Presiden mengatakan pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan swasembada energi Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan potensi energi terbarukan harus dilakukan secara masif agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber energi domestik sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Sebagai tahap awal pelaksanaan program, Pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS, salah satunya PLTS Gilimanuk sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit juga kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaualatan energi nasional. Oleh karena itu, pengembangan energi surya dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia melalui beragam skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pengembangan PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.

Bahlil menambahkan, Program PLTS 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario utama yang mencakup eliminasi PLTU sebesar 12,48



PRESIDEN RI, Prabowo Subianto didampingi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat mendengarkan pemaparan walking gallery oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi (kiri) dalam acara Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 GWp, Selasa (25/8/2026) di Gilimanuk, Bali. **FOTO:** DOK.PLN

GWp, pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mencapai 30,97 GWp, PLTS terapung sebesar 10,72 GWp, PLTS atap sebesar 9,35 GWp, PLTS 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.

Menurut Bahlil, pengembangan PLTS dalam skala besar juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dari sisi ketenagakerjaan, program ini berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,033 juta tenaga kerja manufaktur.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung penuh visi Pemerintah dalam mewujudkan asta cita swasembada energi dan hilirisasi nasional. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan Program PLTS 100 GWp melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, serta pengembangan proyek PLTS dapat berjalan optimal.

“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Se-

bagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung terwujudnya swasembada energi melalui pemanfaatan energi hijau domestik dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Kementerian ESDM, atas dukungan dan arahan dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, keberhasilan Program PLTS 100 GWp membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, maupun masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemerintah kepada PLN. PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal,” kata Darmawan.

Dirinya menambahkan, khusus di wilayah Bali sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 Klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 3.300 MWh. **WJ**

Kapolda Sulteng Salurkan Ratusan Sembako di Ampana Tete



KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat menyalurkan sembako kepada warga Ampana Tete, Senin (24/8/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

SULTENG RAYA - Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Nasri tiba di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una (Touna) dan disambut ratusan warga Ampana Tete, Senin (24/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda juga menggelar bakti sosial dengan menyerahkan bantuan sembako kepada warga penerima manfaat. Kegiatan bakti sosial berlangsung di Mapolsek Ampana Tete. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Sulteng kepada sejumlah warga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan warga. Kedatangan Kapolda Sulteng disambut langsung Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Djayawidya. Turut mendampingi Irwasda Polda Sulteng Purwanto Puji Sutan, sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, serta Ketua Bhayangkari Daerah

Sulteng Ny. Lina Nasri bersama pengurus Bhayangkari Daerah Sulteng. Sejumlah pejabat utama turut mendampingi Kapolda diantaranya, Karo SDM Polda Sulteng Kombes Anton Sudjarwo, Dirlantas Polda Sulteng Kombes Agung Tri Windiartoro, Kabidpropam Polda Sulteng Kombes Roy Satya Putra, Kabidkum Polda Sulteng Kombes Andrie Satiagraha, dan Koorspriim AKBP M. Ryan Citra Yudha Siregar. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulteng Irjen Nasri mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan bagian dari upaya Polri untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Polri akan terus hadir di tengah masyarakat. Apa yang kami berikan mungkin tidak seberapa, tetapi ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Polri kepada masyarakat,” kata Irjen Nasri. Irjen Nasri juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Terpisah, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin menyatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. “Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan warga. Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus sarana memperkuat silaturahmi dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya.

Kunker Di Polres TOUNA

Kapolda Sulteng Titip Pesan Layani Masyarakat dengan Ikhlas

SULTENG RAYA - Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Nasri memberikan arahan kepada personel Polres Tojo Una-Una (Touna) dalam kunjungan kerja di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bhakti Satria, Mako Polres Tojo Una-Una, Selasa (25/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Irwasda Polda Sulteng Purwanto Puji Sutan, Karo SDM Kombes Anton Sudjarwo, Dirlantas Kombes Agung Tri Windiartoro, Kabidpropam Kombes Roy Satya Putra, dan Kabidkum Kombes Andrie Satiagraha. Turut hadir Ketua Bhayangkari Daerah Sulteng Ny. Lina Nasri bersama pengurus Bhayangkari Daerah Sulteng. Kegiatan diawali dengan sambutan Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Djayawidya yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Sulteng beserta rombongan. Ia melaporkan situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una secara umum aman, kondusif dan terkendali berkat sinergitas dengan berbagai pihak serta partisipasi masyarakat. Dalam arahnya, Kapolda Sulteng, Irjen Nasri menekankan pentingnya moralitas, kepatutan dan profesionalitas sebagai landasan utama setiap anggota Polri.



KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat menyalami personel Polres Tojo Una-Una di Aula Bhakti Satria, Mako Polres Tojo Una-Una, Selasa (25/8/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

anggota Polri dalam menjalankan tugas. Menurutnya, konsep Presisi harus diwujudkan melalui perilaku dan pelaksanaan tugas yang benar-benar mencerminkan integritas serta tanggung jawab sebagai anggota Polri. “Setiap anggota Polri harus senantiasa menempatkan moralitas, kepatutan dan profesionalitas sebagai landasan utama dalam setiap tindakan,” kata Irjen Nasri dalam arahnya. Irjen Nasri menjelaskan, moralitas diperlukan agar setiap personel memiliki integritas yang kuat. Sementara kepatutan menjadi batas etis dalam penggunaan kewenangan, sebab tidak semua

tindakan yang memiliki dasar kewenangan secara formal dapat dibenarkan dari sisi etika. “Adapun profesionalitas diwujudkan melalui kompetensi, standar operasional, hukum, prosedur, objektivitas dan akuntabilitas,” ucapnya. Selain itu, Irjen Nasri meminta para pimpinan tidak ragu mengambil keputusan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Ia menekankan pentingnya pimpinan turun langsung melihat kondisi di lapangan agar dapat memahami dinamika, tuntutan dan harapan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi persoalan sejak dini. Kapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk

memperkuat solidaritas, menghindari arogansi kewenangan, menjaga pola hidup sederhana dan tidak menampilkan gaya hidup mewah secara berlebihan. Menurutnya, kekompakan, keteladanan pimpinan, loyalitas, komunikasi dan kerja sama menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. “Pesannya, kita harus bekerja sama dan saling bahu-membahu. Laksanakan setiap panggilan tugas sekecil apa pun dengan ikhlas dan bersyukur. Kita juga harus mampu memperbaiki diri dan terus berbenah,” pesan Kapolda. Terpisah, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan arahan Kapolda menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pesan tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan mengedepankan sikap humanis, profesional dan bertanggung jawab. “Kami berharap seluruh personel mengimplementasikan arahan Kapolda dengan menjaga integritas, profesionalitas dan kekompakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.

Karhutla di Pegunungan Kaliali Sigi Berhasil Dipadamkan



SEJUMLAH warga bersama petugas TNI-Polri berpose bersama usai berhasil memadamkan api di kawasan Pegunungan Kaliali, Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Ahad (23/8/2026). FOTO: DOK KODAM XXIII/PW

SULTENG RAYA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi di kawasan Pegunungan Kaliali, Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Ahad (23/8/2026) sekira pukul 16.00

wita. Kebakaran diperkirakan menghancurkan ±5 hektare lahan perkebunan, dengan lokasi titik api berjarak sekitar 2 kilometer dari permukiman warga. Mendapat informasi terse-

but, Danpos Dolo Selatan Serma Zainal Abidin bersama Kelompok Siaga Bencana (KSB), aparat desa dan masyarakat bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan dan pemadaman.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 20.30 wita, personel gabungan langsung melakukan upaya pemadaman. Pada pukul 21.03 wita, api berhasil dipadamkan. Tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian personel. Situasi saat ini aman dan terkendali, namun pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. TNI bersama masyarakat terus bersinergi dalam penanganan Karhutla serta mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Diskominfosantik Gandeng Humas Polda Sulteng Asah Skill Fotografi dan Editing Video

SULTENG RAYA - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mendorong peningkatan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Pendampingan PPID dalam penggunaan fotografi dan editing video yang melibatkan Bidhumas Polda Sulawesi Tengah. Dengan mengangkat tema "Upaya Membangun Sinergitas dan Kolaborasi dalam Penguatan Informasi Publik Serta Meningkatkan Kemampuan Teknis PPID Provinsi Sulawesi Tengah". Kegiatan terse-



HAJARAN Bidhumas Polda Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, berpose bersama di Ruang Nagana Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (26/8/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG



but berlangsung di Ruang Nagana Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tribun Network, Muh. Al Salsabilla S. Yojokodi sebagai wadah berbagi pengetahuan dan keterampilan teknis dalam menghasilkan dokumentasi visual yang mampu mendukung kebutuhan publikasi dan pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan informasi publik agar lebih informatif, aktual, menarik dan mudah dipahami. Materi fotografi dan editing video juga diarahkan untuk menunjang pembuatan konten pada berbagai kanal komunikasi milik pemerintah. Dalam sambutannya, Kadis Kominfosantik Sulteng, Wahyu Agus Pratama mengatakan, perkembangan te-

knologi dan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pengelola informasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Menurutnya, penyajian informasi melalui visual menjadi salah satu cara efektif agar pesan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih luas. “PPID harus mampu mengikuti perkembangan komunikasi publik. Informasi yang baik tidak hanya akurat, tetapi juga perlu dikemas secara menarik dan mudah dipahami sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat,” kata Kadis Kominfosantik. Di sisi lain, Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, keterampilan fotografi dan editing video memiliki peran penting dalam mendukung kerja kehumasan. Dokumentasi yang berkualitas, kata Kombes

Achmad Muhaimin, dapat memperkuat pesan sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. “Sinergitas ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan. Kami berharap keterampilan yang diperoleh dapat menghasilkan konten yang lebih berkualitas, faktual dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital,” katanya. Kabidhumas menambahkan, kolaborasi antara Polda Sulteng dan Pemprov Sulteng diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pendampingan. Sinergi tersebut perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun komunikasi publik yang transparan, efektif dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kedaulatan di Garis Depan: Saatnya Indonesia Memiliki UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing

KEDAULATAN Indonesia pada era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap kepentingan nasional tidak lagi hanya hadir dalam bentuk konflik bersenjata atau pelanggaran batas wilayah.

OLEH : DIMAS ARYATAMA*

PERKEMBANGAN teknologi, persaingan geopolitik, transformasi ekonomi digital, serta derasnya arus informasi telah menciptakan bentuk-bentuk ancaman baru yang bergerak di ruang yang tidak selalu mudah dijangkau oleh instrumen hukum konvensional. Dalam konteks inilah, gagasan mengenai pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing menjadi semakin relevan untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan nasional Indonesia.

Seminar Nasional “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan ASEAN Study Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 27 Agustus 2026 di Jakarta membuka ruang dialog penting mengenai perubahan karakter ancaman tersebut. Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, parlemen, akademisi, praktisi keamanan, pakar siber, masyarakat sipil, dan pembicara dari luar negeri itu menunjukkan bahwa isu kedaulatan tidak dapat lagi dilihat secara sempit.

Indonesia membutuhkan kesadaran bersama bahwa perubahan lingkungan strategis menuntut pembaruan cara pandang sekaligus pembaruan kebijakan.

Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra menempatkan persoalan spionase dan intervensi asing sebagai ancaman yang perlu direspons secara realistis. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geografis strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan pengaruh yang terus berkembang tidak dapat menutup mata terhadap persaingan kepentingan antarnegara. Keterbukaan Indonesia dalam pengaulan internasional merupakan kekuatan yang harus dijaga, tetapi keterbukaan tersebut perlu disertai kewaspadaan agar tidak berubah menjadi kerentanan terhadap kepentingan asing yang dapat merugikan negara.

Pesan yang disampaikan Kepala BIN penting untuk dipahami dalam konteks pembangunan Indonesia yang semakin maju. Negara yang memiliki potensi ekonomi besar, kekayaan sumber daya, jumlah penduduk besar, serta posisi penting di kawasan tentu akan semakin menarik

perhatian banyak kepentingan. Dalam situasi demikian, Indonesia memerlukan kemampuan yang lebih kuat untuk membedakan kerja sama internasional yang konstruktif dari aktivitas yang berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap kepentingan strategis nasional. Kehadiran regulasi yang jelas justru dapat memberikan kepastian bagi semua pihak mengenai batas-batas yang harus dihormati.

Karena itu, Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Regulasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup Indonesia dari dunia luar atau membatasi demokrasi, melainkan untuk memastikan keterbukaan nasional berjalan dalam koridor yang aman dan berdaulat. Undang-undang yang dirumuskan secara matang dapat memberikan definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk spionase, operasi pengaruh asing, spionase siber, maupun ancaman terhadap kepentingan ekonomi strategis. Kejelasan hukum akan membantu negara bertindak lebih terukur, terkoordinasi, dan tidak semata-mata menunggu ancaman berkembang menjadi krisis.

Penguatan regulasi juga penting untuk mendorong perubahan dari pola respons yang reaktif menjadi pendekatan yang lebih preventif. Negara harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi risiko sejak dini melalui sistem peringatan yang kuat dan koordinasi yang efektif antarlembaga. Dalam kont-

eks ini, penguatan peran dan fungsi BIN sebagai bagian dari komunitas intelijen nasional perlu berjalan bersama dengan penguatan koordinasi bersama kementerian, lembaga, aparat keamanan, serta institusi yang memiliki peran dalam perlindungan sektor strategis.

Perspektif tersebut semakin relevan dalam menghadapi perkembangan dunia siber. Kepala Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja menilai bahwa ancaman keamanan siber saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Perkembangan teknologi telah menjadikan data, algoritma, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, dan platform media sosial sebagai bagian dari ruang persaingan yang memengaruhi kepentingan nasional. Spionase modern dapat berkembang melalui berbagai metode yang jauh lebih kompleks dibandingkan pendekatan konvensional.

Menurut Ardi, Indonesia perlu mengubah cara pandang terhadap keamanan siber dan membangun kemampuan pencegahan yang lebih kuat. Kesadaran terhadap ancaman, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi harus menjadi bagian dari strategi nasional. Pandangan ini memperkuat urgensi pembentukan kebijakan yang komprehensif, sebab perlindungan terhadap kedaulatan nasional saat ini juga mencakup perlindungan data strategis, infrastruktur digital, sistem ekonomi, serta ruang informasi.

Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menegaskan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam menghadapi persoalan strategis bangsa. Universitas, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi menara gading, tetapi harus mampu menghadirkan pemikiran dan rekomendasi yang berguna bagi masyarakat dan negara. Semangat inilah yang perlu terus dikembangkan dalam pembahasan kebijakan penanggulangan spionase dan intervensi asing. Perbedaan pandangan antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat sipil bukan hambatan, melainkan kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih matang.

Pada akhirnya, menjaga kedaulatan bukan sekadar tugas satu lembaga atau satu sektor. Kedaulatan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan negara yang kuat, masyarakat yang sadar, akademisi yang kritis, serta kebijakan yang mampu menjawab perkembangan zaman. UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun Indonesia yang semakin tangguh, berdaulat, demokratis, dan percaya diri dalam menghadapi persain-gan global. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang akuntabel, Indonesia dapat memperkuat garis pertahanannya tanpa kehilangan karakter sebagai negara demokrasi yang terbuka dan berorientasi pada kepentingan rakyat. **Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Keamanan Nasional*

TAJUK

Pemimpin di Tengah Bencana

SEJAK gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026, hingga kini masyarakat di sana belum dapat hidup tenang. Mereka masih diliputi rasa waswas karena gempa susulan masih terus berlangsung hingga kini.

Meski guncangannya tak sedahsyat gempa pertama, tetap saja gempa susulan itu membuat takut warga. Berdasarkan data BMKG, hingga Rabu (26/8), tercatat 7.492 kali terjadi gempa susulan. Sebanyak 33 gempa susulan di antaranya bermagnitudo di atas 5.

Warga memilih tetap tinggal di tenda-tenda pengungsian di tanah lapang. Mereka masih takut untuk kembali ke rumah masing-masing. Sudah hampir dua pekan mereka meninggalkan tempat tinggal. Tak dipikirkan lagi nasib rumah beserta isinya yang sudah porak-poranda. Bagi mereka, keselamatan jiwa menjadi prioritas di atas segalanya. Rasa lelah lahir dan batin pun tentu dirasakan para pengungsi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (25/8) pukul 16.00 WIB, menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 179.037 orang dan korban meninggal yang telah ditemukan sebanyak 105 orang.

Dalam catatan BNPB, pengungsi tersebar di tujuh kabupaten, dengan jumlah terbanyak di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Jumlah pengungsi tiap hari bersifat dinamis karena ada warga yang sudah kembali ke rumah, terutama di Kabupaten Sikka, tetapi di saat bersamaan terjadi penambahan pengungsi di tempat lain.

Meski titik-titik pengungsian sudah terdataba, penyaluran bantuan ternyata tak semudah yang dibayangkan. Banyaknya akses jalan yang putus akibat gempa membuat sejumlah wilayah terisolasi. Alhasil, pasokan bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya tersendat.

Sekali lagi, sulit sekali dibayangkan, betapa lelahnya hati masyarakat di sana menjalani hidup hampir dua pekan di bawah tenda pengungsian. Mereka harus tinggal di tenda, di tengah sengatan matahari yang teramat terik dalam beberapa bulan terakhir.

Maka, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah pengungsi, kemarin, menjadi salah satu oase di tengah lelahnya hati masyarakat. Bersama sejumlah pejabat yang menyertainya, Presiden memastikan penanganan gempa berjalan cepat, terarah, dan merata di seluruh daerah yang terdampak bencana. Ya, kecepatan penyaluran bantuan, dibarengi dengan terarah dan meratanya bantuan, menjadi poin krusial di tengah kedaruratan gempa saat ini.

Saudara-saudara kita di tenda pengungsian saat ini membutuhkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan tentu saja jangan sampai dilupakan, kebutuhan anak-anak. Untuk sementara, anak-anak di sana terpaksa kehilangan hak bermain dan belajar akibat gempa.

Kedatangan Presiden bersama sejumlah pejabat terkait di tengah bencana tentu menjadi penguat moral bagi warga yang sedang mengalami trauma. Keberadaan para pejabat pusat dan daerah itu tak boleh berhenti di tataran tanggung jawab administratif.

Kehadiran mereka harus dirasakan secara nyata sebagai bukti nyata bahwa negara hadir di saat bencana. Karena itu, kehadiran nyata negara tersebut harus dibuktikan lewat makin cepatnya koordinasi dan realisasi penyaluran bantuan. Bukan cuma itu, kecepatan juga dibutuhkan dalam proses rehabilitasi jika gempa sudah berlalu.

Kehadiran Presiden di NTT patut mendapat apresiasi karena akan memotivasi dan berdampak besar bagi para penyintas. Langkah Presiden itu bisa menjadi langkah awal bagi korban gempa untuk segera bangkit kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa rasa waswas.

Kunjungan Presiden juga sekaligus menjadi antitesis dari perilaku para pejabat dan tokoh publik yang sebelumnya kerap menjadikan lokasi bencana sebagai objek untuk mendongkrak popularitas. Dalam rapat kabinet paripurna Desember 2025 silam, saat membahas penanganan bencana tanah longsor di Sumatra, Presiden bahkan sampai mengkritik keras perilaku mereka itu. Presiden menyebut mereka tengah berwisata bencana karena datang hanya untuk berfoto, tanpa memberi solusi.

Dengan demikian, langkah Presiden kemarin sekaligus juga menjadi gagasan gerak bersama seluruh komponen bangsa untuk kembali membangun NTT, termasuk Sumatra, yang hingga kini masih butuh penanganan khusus. **Media Indonesia*

Dari Loyalitas ke Intelektualitas: Kritik Terhadap Kampus Feodal

ADA satu ironi yang kerap kita rasakan di kampus. Institusi yang seharusnya menjadi ruang paling bebas untuk berpikir justru kadang tumbuh menjadi ruang yang hierarkis, bahkan cenderung feodal.

OLEH : AHMAD UMAM AUFI

DALAM Dialectic of Enlightenment (2002: 3-4), Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer mengingatkan bahwa rasionalitas modern tidak selalu menghasilkan pembebasan, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen dominasi. Kampus yang idealnya menjadi ruang pencerahan pun dapat terjebak dalam logika kepatuhan, pengendalian, dan relasi kuasa.

Di ruang kelas dan seminar, istilah demokrasi, meritokrasi, dan kebebasan akademik sering menjadi wacana yang akrab. Namun dalam praktik sehari-hari, relasi kuasa kadang masih ditentukan oleh jabatan, pangkat, kedekatan dengan pimpinan, dan status sebagai “orang dalam”. Dalam Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975), Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui larangan atau paksaan terbuka, tetapi juga melalui normalisasi dan disiplin yang menentukan siapa yang pantas berbicara

dan siapa yang memilih diam.

Oleh karena itu, feodalisme kampus tidak selalu tampil dalam bentuk yang kasar. Ia justru dapat hadir dalam wajah yang rapi, administratif, dan tampak profesional. Loyalitas kepada pimpinan kadang lebih dihargai daripada keberanian menyampaikan kritik, sementara perbedaan pendapat mudah diterjemahkan sebagai sikap tidak kooperatif. Padahal kampus bukan sekadar organisasi yang hanya dapat tumbuh jika sivitas akademika memiliki ruang untuk bertanya, berbeda pendapat, dan mengoreksi kekuasaan tanpa rasa takut.

Dalam budaya kampus yang cenderung feodal, hierarki tidak hanya dibentuk oleh kompetensi, tetapi juga oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Jabatan kemudian dapat berubah menjadi alat distribusi akses yang menentukan siapa yang memperoleh kesempatan, siapa yang dilibatkan dalam pengambilan

keputusan, dan siapa yang tersingkir dari ruang strategis. Persoalannya bukan pada keberadaan struktur organisasi, melainkan ketika hierarki administratif berubah menjadi hierarki intelektual, seolah-olah jabatan otomatis membuat seseorang lebih benar secara akademik. Dampak paling nyata dari situasi ini adalah tumbuhnya budaya diam.

Dalam Selections from the Prison Notebooks (1971: 12), Antonio Gramsci menjelaskan bagaimana dominasi dapat bekerja melalui hegemoni, yaitu ketika relasi kuasa diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dosen di kampus tidak selalu bungkam karena dipaksa, tetapi karena memahami bahwa kritik dapat membawa konsekuensi terhadap akses, kesempatan, atau relasi kerja. Dari sinilah muncul kalkulasi yang sangat manusiawi, lebih aman menjadi loyal daripada menjadi kritis.

Namun, di sinilah konsep loyalitas perlu ditafsirkan ulang, terutama dalam sistem perguruan tinggi dan birokrasi dosen ASN. Loyalitas tidak seharusnya dimaknai sebagai kesetiaan personal kepada pejabat tertentu, melainkan kepada mandat kelembagaan, kepentingan publik, dan integritas akademik. Dalam pengertian ini, kritik bukan lawan dari loyalitas, melainkan bentuk loyalitas yang lebih substantif karena menjaga

agar institusi tetap berada pada jalurnya.

Relasi antara pimpinan dan dosen dalam sistem ASN juga perlu ditempatkan secara proporsional. Secara administratif terdapat struktur kewenangan, tetapi dalam ruang akademik, kebenaran tidak ditentukan oleh jabatan. Dalam The Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and System (1987: 8-15), Jürgen Habermas menempatkan tindakan komunikatif pada orientasi untuk mencapai pemahaman bersama (mutual understanding), bukan sekadar keberhasilan strategis. Dalam konteks institusi, gagasan ini dapat menjadi dasar untuk menempatkan argumentasi rasional di atas sekadar kepatuhan terhadap posisi kekuasaan. Perbedaan jabatan tidak boleh menghapusp kesetaraan sebagai subjek yang berpikir.

Di sinilah penting membedakan antara kepatuhan administratif dan otonomi akademik. Dosen ASN tentu wajib menjalankan aturan organisasi, tetapi tidak harus tunduk secara intelektual kepada individu yang sedang memegang jabatan. Dosen tetap memiliki kebebasan untuk mempertanyakan kebijakan, mengevaluasi argumentasi, dan menyampaikan pandangan ilmiah yang berbeda. Persoalannya, modernisasi kampus sering kali lebih menekankan transformasi

teknis daripada demokratisasi kehidupan akademik. Digitalisasi, internasionalisasi, dan ambisi menjadi world-class university tidak otomatis membuat institusi lebih adil. Hal tersebut mereduksi realitas menjadi sesuatu yang sekadar terukur dan dikelola, tanpa menyentuh relasi kuasa di dalamnya.

Kampus yang benar-benar modern seharusnya mampu menerima perbedaan pendapat tanpa menganggapnya sebagai pembangkangan. Institusi dapat mereproduksi hierarki melalui mekanisme yang tampak objektif namun tidak sepenuhnya meritokratis. Karena itu, promosi jabatan dan distribusi sumber daya harus berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan nyata bagi dosen yang menyampaikan kritik secara akademik. Kebebasan akademik tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus dijamin melalui mekanisme kelembagaan yang mencegah pembalasan dalam bentuk pengucilan, hambatan karier, atau tekanan informal. Sebab kebebasan akademik sering tidak hilang secara tiba-tiba, melainkan menyusut perlahan melalui budaya diam dan ketakutan untuk berbeda pendapat. *Penulis: Dosen agama Islam Politik Maritim Negeri Indonesia *Geotimes.id*

 PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205222-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi di luar tanggung jawab percetakan)	WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI	PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.
		REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam. BIRO BANGKAP: Pariaman Tamblunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T. E. DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. EMAIL: sultengraya7h@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

BRI Palu Gandeng 116 Developer Dukung Akselerasi Program 3 Juta Rumah Pemerintah



AREA Head BRI Palu, Asep Suhendra. FOTO: DOK. SULTENG RAYA

SULTENG RAYA – Harga rumah subsidi yang relatif TERJANGKAU membuat sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih menjadi pasar yang menarik bagi pengembang di Sulawesi Tengah.

Area Head BRI Palu, Asep Suhendra, mengatakan tingginya minat tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“BRI saat ini sudah sangat luar biasa untuk kredit konsumen, di dalamnya ada KPR subsidi atau FLPP. Ini memang sejalan

dengan program pemerintah untuk pemenuhan tiga juta rumah bagi MBR,” kata Asep, kepada awak media, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, harga rumah subsidi untuk kluster Sulawesi yang berada di kisaran Rp173 juta menjadi salah satu daya tarik bagi pengembang. Selain harga, lokasi perumahan di Palu dan sekitarnya dinilai masih strategis karena relatif mudah menjangkau pusat perkantoran dan berbagai fasilitas kota.

BRI bahkan telah memperluas penyaluran KPR subsidi tidak hanya di Kota Palu dan Sigi, tetapi hingga Kabupaten Parigi Moutong dan Pasangkayu.

Saat ini, kata Asep, sebanyak 116 developer di Sulawesi Tengah telah menjalin kemitraan dengan BRI.

Namun, BRI tidak serta-merta menerima seluruh proyek perumahan untuk masuk dalam pembiayaan KPR subsidi. Asep menegaskan, pihaknya menetapkan standar tertentu untuk memastikan rumah yang dibiayai benar-benar layak ditempati.

“Rumah yang masuk kredit adalah rumah yang siap huni, fasilitas umum sudah jalan. Sertifikatnya juga sudah terpecah, tinggal balik nama ke debitur,” ujarnya.

Asep menyebut proses tersebut dapat dipantau melalui pelaporan trilogi yang

melibatkan developer, bank, dan debitur.

Di tengah persaingan perbankan dalam penyaluran KPR subsidi, BRI Palu juga

menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Berdasarkan survei internal yang dilakukan beberapa waktu lalu, BRI Palu menempati urutan

kedua dalam penyaluran KPR subsidi.

Kondisi itu menunjukkan kebutuhan rumah terjangkau di Sulteng masih men-

jadi peluang besar, sekaligus ruang bagi perbankan untuk mempercepat akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. **KRR**

Ekonomi Indonesia: Ekonom Optimistis, Publik Pesimistis



ILUSTRASI Pandangan Kondisi Ekonomi RI. FOTO: ARI SAPUTRA/DETIKFOTO

249 ASN BGN Dipecat!

SULTENG RAYA - Sebanyak 249 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah diberhentikan. Pemberhentian ini menyusul adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala dapur yang mengelola program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, sudah ada puluhan kepala SPPG yang tidak disiplin, tidak pernah ke kantor.

“Sudah ada 66 yang diberhentikan ini baru satu bulan ya,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (26/8/2026).

Zulhas menyebut status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diharuskan hadir ke kantor. Adapun total akumulasi kepala dapur MBG yang telah dipecat mencapai 249 orang.

Zulhas menegaskan Kepala SPPG bertanggung jawab sebagai pengawas makanan di tempat sangat vital demi menghindari bahaya dan memastikan kualitas makanan.

“(Kepala) SPPG nggak disiplin, ya, enggak ngantor, enggak datang ke kantor. Kan mereka PPPK, kalau enggak ngantor berapa kali itu harus diberhentikan. Nah, ini tegas sudah 183 plus 66 yang dipecat,” tambah ia.

Sebelumnya, sebanyak 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proses pemberhentian secara tidak hormat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan pemberhentian secara tidak hormat ini karena pegawai-pegawai tersebut melakukan tindakan indisipliner. Ia membeberkan sejumlah tindakan indisipliner yang dilakukan kepala dapur MBG, mulai dari penipuan, terlibat judi online, hingga هنگكي pengki.

“Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau Kepala Dapur, 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi, diberhentikan secara tidak hormat,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat.

Badan Kepegawaian Negara sudah memproses pemberhentian kepada puluhan pegawai tersebut. Adapun 66 kasus kepala SPPG ini tersebar di Jawa Barat 29 kasus, Jakarta & Banten sebanyak 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kalimantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus, dan wilayah lainnya 5 kasus.

Tak hanya itu, sebanyak 60 kasus masih dalam pembinaan internal. Sudaryono menyebut pihaknya masih mengecek konflik yang terjadi antara Kepala Dapur dan MBG. **DTC**



MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. FOTO: KEMENKO PANGAN

SULTENG RAYA - Pandangan ekonom terhadap kondisi perekonomian Indonesia berbeda dengan persepsi masyarakat secara umum. Para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis optimistis terhadap ekonomi Indonesia pada semester II-2026. Masyarakat umum sebaliknya.

Hal tersebut tertuang dalam survei yang dilakukan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI). Survei dilakukan secara online dan melibatkan 4.012 responden yang memiliki latar belakang ekonomi.

Hasil survei menunjukkan para ekonom dan responden menilai positif pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026. Hal itu tercermin dari indeks persepsi sebesar 60. Kinerja pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dinilai menjadi modal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Optimisme bahkan meningkat ketika responden ditanya mengenai prospek ekonomi pada semester II-2026. Indeks persepsi mencapai 62,3, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I-2026.

“Para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis pada umumnya mempunyai persepsi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester 1 tahun 2026 ini (indeks 60). Kinerja pertumbuhan 5 persen dinilai sebagai modal untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ekonom Senior sekaligus Pengurus Pusat ISEI, Didik J Rachbini, dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Persepsi para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis tentang pertumbuhan ekonomi semester 2 yang akan datang optimis (indeks 62,3), seperti ditunjukkan dalam indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan

indeks semester pertama,” lanjutnya.

Optimisme tersebut juga terlihat dari pandangan responden terhadap kinerja ekspor. Ekspor dinilai akan tumbuh lebih baik dibandingkan impor, dengan indeks sebesar 60,3.

Untuk semester II-2026, keyakinan terhadap kinerja ekspor bahkan meningkat. Indeks persepsi mencapai 62. Meski demikian, responden masih kurang yakin terhadap kondisi pengangguran dan tingkat inflasi.

Berbeda dengan Persepsi Publik

Optimisme para ekonom tersebut berbeda dengan hasil survei terhadap masyarakat secara umum. Didik membandingkannya dengan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026. Berdasarkan survei tersebut, penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional berada pada level terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Sebanyak 49,4% responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau sangat buruk. Sementara itu, hanya 15,7% masyarakat yang menilai kondisi ekonomi dalam keadaan baik atau sangat baik.

Perbedaan hasil tersebut dinilai berkaitan dengan karakteristik responden. Survei ISEI menggunakan metode purposive sampling dan secara khusus menyoroti responden dengan latar belakang ekonomi dan bisnis. Sementara itu, survei terhadap publik secara umum menggunakan responden yang dipilih secara acak.

“Bagaimana survei ini bisa berbeda? Responden yang pertama (diambil secara purposive) adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih mendalam dibandingkan dengan survei publik, yang diambil secara acak,” ujar Didik.

“Survei yang pertama melihat keadaan lebih realistis karena mengetahui dengan

lebih benar dibandingkan dengan yang kedua, yang lebih merupakan persepsi,” sambungannya.

EKONOM MASIH RAGU SOAL KEPASTIAN HUKUM

Di tengah optimisme terhadap perekonomian, para ekonom justru memberikan penilaian yang relatif rendah terhadap kepastian hukum.

Indeks persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum tercatat 53,4. Artinya, responden belum yakin pemerintah dapat menjamin kepastian hukum dengan baik. Penilaian tersebut relatif sejalan dengan persepsi masyarakat dalam survei SMRC.

Dalam survei tersebut, hanya 26,4% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik. Sebanyak 37,6% menilainya buruk atau sangat buruk, sementara 30,2% menilai kondisi penegakan hukum sedang.

Didik mengatakan optimisme anggota ISEI terutama terlihat dari ekspektasi bahwa kondisi perekonomian akan membaik dalam enam bulan ke depan. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diwaspadai, terutama daya beli masyarakat, kenaikan harga pangan dan energi, serta defisit APBN.

“Kesimpulan dari survei ISEI ini adalah optimisme yang cukup menonjol dimana anggota ISEI memiliki ekspektasi kondisi perekonomian akan semakin baik dalam 6 bulan ke depan (semester kedua),” kata Didik.

“Namun tantangan yang menghadang tidak lain adalah daya beli masyarakat, peningkatan harga-harga (pangan dan energi), defisit APBN. Berbeda dengan persepsi umum, anggota ISEI cukup percaya bahwa pemerintah (pusat dan daerah) dinilai memiliki kemampuan dalam peningkatan perekonomian Indonesia,” pungkasnya. **DTC**



PERTAMINA SULAWESI

Perkuat Pengelolaan Sampah di Kolaka Melalui Bantuan Motor Tiga Roda

SULTENG RAYA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Fuel Terminal Kolaka terus memperkuat kontribusinya terhadap pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan satu unit motor tiga roda untuk mendukung kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Bantuan kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman. Ketersediaan sarana yang lebih memadai juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah secara lebih teratur dan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih serta nyaman bagi

masyarakat.

Fuel Terminal Manager Kolaka, Georgius Benny Hartoyo, mengatakan dukungan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk memberikan manfaat yang relevan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kami berharap bantuan motor tiga roda ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pengelolaan sampah di Kelurahan Kolakaasi. Dengan adanya sarana pendukung yang memadai, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Georgius.

Menurutnya, keberlanjutan pengelolaan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga keber-

sihan lingkungan sehari-hari.

“Sarana yang kami berikan tentu perlu diiringi dengan partisipasi masyarakat. Kesadaran untuk menjaga kebersihan, mengurangi sampah, serta mengelola sampah dengan baik menjadi bagian penting agar manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Program ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan melalui dukungan terhadap lingkungan permukiman yang lebih bersih dan layak, serta SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab melalui penguatan praktik pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Melalui dukungan sarana tersebut, Pertamina juga mendorong tumbuhnya kesadaran bersama bahwa

pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab yang membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa program sosial dan lingkungan Pertamina dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak yang berkelanjutan.

“Kami ingin kehadiran Pertamina di tengah masyarakat memberikan manfaat yang nyata dan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang. Dukungan terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Kolakaasi menjadi salah satu bentuk kontribusi kami dalam mendorong lingkungan yang lebih bersih sekaligus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat,” kata Lilik.

Lilik menambahkan bahwa

keberhasilan program lingkungan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pemanfaatan sarana serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Motor tiga roda ini merupakan sarana pendukung. Yang paling penting adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara konsisten dan mendorong

kebiasaan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kolakaasi,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Fuel Terminal Kolaka akan terus mengembangkan kolaborasi

bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program sosial dan lingkungan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan di sekitar wilayah operasional. ^{WAN}

KODIM 1311 dari halaman1

Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) Morowali, Letkol Inf. Boyke Baja Imanuel Sirait, saat Silaturahmi bersama insan Jurnalis Kabupaten Morowali Utara, Kamis (27/8/2026), di salah satu Cafe & Resto di Kota Kolonodale.

Dalam keterangannya, Dandim menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi kesulitan.

Ia mengatakan pembangunan panti asuhan ini bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan sebuah komitmen moral Tentara untuk memastikan anak-anak yatim piatu mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan kasih sayang.

“Mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Menurut rencana, panti asuhan tersebut akan dibangun di atas lahan yang berlokasi strategis di Morowali Utara. Bangunan ini akan dilengkapi dengan asrama putra-putri, ruang belajar, perpustakaan mini, serta area bermain. Kodim juga akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengusaha lokal, dan relawan, untuk memastikan operasional panti berjalan baik.

“Kami akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

dalam hal ini pak Bupati untuk mewujudkan rencana ini,” ujarnya.

Kodim juga membuka pintu bagi masyarakat luas yang ingin turut berpartisipasi, baik melalui donasi material bangunan maupun dana sosial, dengan tetap berkoordinasi melalui mekanisme resmi yang berlaku. Dengan program ini, Kodim Morowali berharap dapat semakin mempercepat kemandirian TNI dengan rakyat serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli dan tangguh.

Selain program peningkatan kualitas anak-anak kurang mampu, Kodim juga menunjukkan komitmen nyata TNI Angkatan Darat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kodim setempat akan turun tangan membantu para petani yang selama ini mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, sekaligus merespons kebutuhan mendesak akan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi di wilayah binaannya.

Dalam kegiatan Silaturahmi itu Dandim menden-garkan langsung keluhan seorang wartawan terkait alokasi pupuk yang sulit di dapat dan sering terlambat, harga di tingkat pengecer yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta sistem distribusi yang dinilai belum merata.

Menanggapi hal itu, Dandim menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi

intensif dengan Dinas Pertanian, distributor resmi, dan Babinsa di setiap desa untuk memastikan pupuk sampai ke tangan petani yang berhak.

“Saya punya koneksi bagus dengan pihak Kementerian Pertanian, saya akan berupaya untuk membantu. Sebab sektor pertanian ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Selain persoalan pupuk, Dandim juga merespons cepat usulan terkait pembangunan dan normalisasi saluran irigasi yang selama ini menjadi kendala utama pengairan sawah, terutama saat musim tanam tiba di tiga Desa di Kecamatan Lembo yaitu Desa Uluanso, Mora dan Desa Tingkea'o.

Ia akan mengerahkan anggota jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi persawahan yang hingga kini belum teraliri air irigasi. Langkah ini diambil setelah menerima laporan tersebut mengenai masih adanya lahan pertanian yang kekeringan.

Dandim menegaskan bahwa pengecekan lapangan ini bertujuan untuk memastikan titik-titik sawah yang paling terdampak, sekaligus mencari tahu penyebab tersendatnya aliran air, baik karena saluran irigasi yang rusak, pendangkalan, maupun persoalan pintu air agar mendapatkan perbaikan untuk memudahkan para petani menanam padi. ^{VAN}

SOLIDARITAS dari halaman1

Salah satunya melalui aksi sosial PT Sentra Pangan Sejahtera (SPS) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Parigi Moutong.

Kamis (27/8/2026), bantuan logistik berupa kebutuhan pangan pokok disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang.

Beras, mie instan, minuman, susu hingga biskuit untuk anak-anak menjadi bagian dari bantuan yang diharapkan dapat menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.

Manajemen PT SPS, Yau Sen, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud gotong royong perusahaan bersama masyarakat di tengah situasi bencana.

Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak semata-mata berkaitan dengan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Ketika masyarakat di sekitar perusahaan menghadapi musibah, perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan memberikan dukungan.

“Kami ingin hadir membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,” kata Yau Sen.

Kepedulian itu juga menyentuh lingkungan internal perusahaan. Sejumlah karyawan PT SPS disebut turut menjadi korban banjir.

Karena itu, selain bantuan logistik untuk masyarakat secara umum, perusahaan memberikan perhatian khusus kepada karyawan yang terdampak,

termasuk melalui penyaluran pakaian layak pakai.

“Selain bantuan logistik secara umum, perusahaan juga memberikan perhatian khusus bagi kebutuhan pribadi karyawan yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan pakaian layak pakai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, menilai aksi bersama tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana dunia usaha dapat mengambil bagian dalam membantu masyarakat ketika bencana terjadi.

Menurut Faradiba, bantuan yang diberikan memang belum akan menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi para korban. Namun, dukungan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.

“Meskipun bantuan yang diberikan belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan yang ada, diharapkan logistik tersebut dapat meringankan beban hidup para korban,” tuturnya.

PT SPS dan KADIN Parigi Moutong juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Jika kebutuhan masyarakat masih mendesak, penyaluran bantuan tahap berikutnya akan dipertimbangkan sesuai situasi dan kemampuan yang ada.

Banjir yang menerjang Desa Avolua tidak hanya menyisakan genangan, tetapi juga material lumpur dan gelombang kayu yang berserakan di

sejumlah titik permukiman. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan membutuhkan waktu dan kerja bersama.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan status tanggap darurat menyusul bencana banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Parigi Moutong, Moh Rivai, mengatakan status tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 8 September 2026.

Selama periode tersebut, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pembersihan lumpur yang mengendap di permukiman serta normalisasi sungai.

“Status tanggap darurat berlangsung 14 hari kedepan,” kata Rivai, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat proses pembersihan dan pemulihan kondisi masyarakat.

Sekitar 200 personel TNI dan Polri turut bergabung bersama tim penanganan di lapangan. Kehadiran mereka diarahkan untuk mendukung berbagai proses penanganan pascabencana, termasuk pembersihan material yang terbawa banjir.

“Penanganan tanggap darurat tentunya melibatkan lintas sektor melalui kerja-kerja kolaborasi. Saat ini kurang lebih 200 personel TNI/Polri bergabung dengan tim di lapangan,” pungkasnya. ^{MI}

KERJASAMA dari halaman1

Ia menjelaskan, Sulawesi Tengah memiliki wilayah yang luas dengan 12 kabupaten dan satu kota, serta memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan, salah satunya kakao.

Berdasarkan data produksi, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah penghasil kakao dengan produksi mencapai sekitar 126.516 ton pada tahun 2025. Namun, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti penurunan produktivitas akibat kondisi tanah, tanaman yang sudah tua, serangan hama, perubahan cuaca ekstrem, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan pembinaan dan penerapan teknologi budidaya.

Menurut Wagub, pemerintah daerah terus mencari solusi melalui penguatan model pertanian berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama dengan mitra internasional.

Selain kakao, Wagub juga menyampaikan potensi pen-

gembangan komoditas kelapa dan hilirisasi produk perkebunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pembangunan industri pengolahan agar hasil perkebunan memiliki nilai tambah.

Ia mencontohkan, pengolahan kelapa nantinya dapat menghasilkan berbagai produk turunan seperti santan, susu kelapa, hingga pemanfaatan tempurung sebagai bahan energi alternatif. “Semua bagian dari komoditas harus memiliki nilai ekonomi. Dengan hilirisasi, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah tetapi mendapatkan manfaat yang lebih besar,” katanya.

Wagub juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok pertanian, keterlibatan sektor swasta, BUMN, BUMD, serta koperasi Merah Putih dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyampaikan apresiasi

asi atas sambutan hangat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia menegaskan komitmen Jerman untuk terus memperkuat hubungan kerja sama ekonomi dengan Indonesia, termasuk memperluas peluang kerja sama dengan Sulawesi Tengah.

Ralf Beste mengatakan, hubungan kerja sama antara Jerman dan Indonesia telah terjalin selama kurang lebih 70 tahun dan terus berkembang di berbagai bidang.

Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, serta pengelolaan sumber daya alam.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, Duta Besar Jerman juga menyoroti potensi kerja sama di bidang mineral yang menjadi salah satu sektor unggulan Sulteng.

Kedutaan Besar Jerman, kata dia, siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku

usaha Jerman dengan mitra di Sulawesi Tengah untuk menjajaki peluang investasi yang saling menguntungkan.

“Kerja sama ini tidak hanya mencakup pertanian dan perkebunan, tetapi juga sektor mineral. Kami siap membantu mencocokkan peluang bisnis yang ada di Sulawesi Tengah dengan perusahaan-perusahaan Jerman yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi,” ujar Ralf Beste.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan kemitraan strategis antara Sulawesi Tengah dan Jerman melalui investasi berkelanjutan, pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, serta pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan plakat kepada Duta Besar Jerman sebagai simbol penguatan hubungan dan komitmen kerja sama kedua belah pihak. ^{WAN}

PEMROV dari halaman1

Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina kemudian melakukan langkah antisipasi dengan mencari pasokan alternatif dari Depot Bau-Bau serta mengambil stok dari Depot Poso.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesta-

bilan stok BBM di wilayah Sulawesi Tengah sekaligus mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan di sejumlah SPBU.

Pertamina juga menyampaikan bahwa pasokan dari Bau-Bau dan Bitung telah kembali masuk secara normal pada periode 20 hingga 24 Agustus 2026. Sementara itu, kondisi antrian di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Palu, pada Rabu

(26/8/2026) disebut sudah mulai normal.

Rudi mengatakan Pemprov Sulteng berharap pemenuhan kebutuhan BBM dapat segera kembali normal dan masyarakat tidak perlu panik. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik dan

membeli BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Jangan melakukan pembelian berlebihan karena justru dapat menimbulkan kepanikan dan memperpanjang antrian,” pesannya.

Pemprov Sulteng bersama Pertamina akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. ^{ANT}

KAKAO dari halaman1

Morowali 882 ton, Banggai Kepulauan 257 ton, Banggai Laut 167 ton, serta Kota Palu sebesar 4,62 ton.

Dia mengungkapkan saat ini, Kementerian Pertanian,

hilirisasi kakao di Sulteng dalam dua tahun terakhir sangat besar. Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan bibit sebanyak 18,7 juta bibit kakao untuk

peremajaan kembali.

Dia mengungkapkan kalau tiga sampai empat tahun kemudian tumbuh baik, maka produktivitas akan meningkat dua kali lipat dari saat ini.

Ke depannya, pemanfaatan sampah organik juga berpotensi diperluas ke desa-desa lain sekitar kawasan IMIP. Pengembangan PESONA TANI juga tidak berhenti pada produksi pupuk kompos. Kelompok Tani Alam Terpadu perlahan mulai merancang pemanfaatan pupuk untuk budi daya padi organik secara mandiri.

“Masyarakat juga sudah mengajukan kepada kami rencana pemanfaatan jerigen bekas minyak goreng berukuran besar dari aktivitas pengolahan makanan bagi karyawan yang bekerja di IMIP untuk dijadikan sebagai media tanam. Metode ini menjadi salah satu alternatif, karena budi daya padi tidak harus menggunakan lahan persawahan,” sambung Ferdi.

Melalui PESONA TANI,

lipat dari saat ini.

“Kami punya lahan dan ada produksi, bagaimana kalau ada pabrik, tentu lebih tinggi produksinya,” katanya menegaskan. ^{ANT}

IMIP bersama masyarakat

terus mendorong terbentuknya pengelolaan sampah organik yang terintegrasi, mulai dari pemilahan, pengolahan menjadi pupuk kompos, hingga pemanfaatannya kembali untuk kegiatan pertanian. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sumber daya untuk menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Pengembangan pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, serta kesiapan sumber daya pendukung pengelolaan kompos,” tandas Ferdi. ^{WAN}

terstruktur dan akuntabel.

“Selama ini pencatatan administrasi terkait jumlah pupuk yang diproduksi dan yang sudah terjual masih perlu diperkuat. Karena itu, kami terus memberikan sosialisasi dan pendampingan,” jelas Section Head Pilar Lingkungan CSR IMIP, Ferdi Eka Saputra, Kamis, (27/08/2026).

Menurut Ferdi, penguatan administrasi tersebut penting untuk membantu kelompok mengetahui perkembangan produksi sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan pengembangan usaha ke depan. IMIP juga turut mendukung pengujian laboratorium terhadap komposisi kompos yang sudah diproduksi. Hal itu dilakukan untuk uji kualitas pupuk sekaligus

upaya meningkatkan mutu produk yang nantinya akan dijual kepada petani di sekitar lokasi pengolahan.

Kegiatan yang diinisiasi masyarakat Desa Le-le sejak tahun 2025 ini sekaligus berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah dari rumah tangga, UMKM makanan, maupun sisa sayuran dari pasar tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos. Dalam proses pengambilan bahan baku, tersendiri nilai keuntungan memberdi bagi pengelolaan sampah di TPS yang berada di Desa Le-le, karena sampah organik dan non-organik telah dipilah lebih dulu. Potensi sumber bahan baku lain juga diperoleh dari limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Le-le.

Untad Pastikan Uang Jaminan Toga Wisudawan Dikembalikan



WAKIL Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc saat menyaksikan pengembalian uang jaminan toga kepada wisudawan angkatan 137 dan 138. **FOTO: HUMAS**

SULTENG RAYA-Universitas Tadulako (Untad) menindaklanjuti informasi dan keluhan yang berkembang di media sosial terkait kendala pengembalian uang jaminan toga kepada wisudawan angkatan 137 dan 138.

Berdasarkan informasi dari pengelola, proses pengembalian saat ini sedang berlangsung dan terus ditindaklanjuti hingga seluruh wisudawan yang memenuhi ketentuan menerima kembali uang jaminannya.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc, mengatakan bahwa sebelumnya Untad telah meminta penjelasan kepada pihak yang menangani pengelolaan toga dan uang jaminan tersebut. Dari hasil koordinasi, keterlambatan pengembalian antara lain berkaitan dengan padatnya rangkaian kegiatan wisuda dalam waktu yang berdekatan.

“Informasi yang kami terima dari pengelola, proses pengembalian saat ini sedang berjalan. Memang ada kendala dalam prosesnya, salah satunya karena pelaksanaan Wisuda ke-137 dan ke-138 berlangsung dalam waktu

yang berdekatan sehingga pengelolaan toga dan administrasinya cukup padat,” ujar Dr. Aiyen.

Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan proses pengembalian uang jaminan tidak dapat dilakukan secepat yang diharapkan. Proses pengembalian toga, verifikasi administrasi, serta penyiapan toga untuk penggunaan berikutnya membutuhkan waktu lebih panjang. Namun, pihak pengelola saat ini terus melakukan penuntasan proses pengembalian.

Selain proses pengembalian uang jaminan, Pihak pengelola juga telah mengambil langkah terkait denda keterlambatan pengembalian toga. Sesuai dengan pengumuman yang disampaikan melalui media sosial Pusat Bisnis Untad, denda keterlambatan pengembalian toga bagi wisudawan Wisuda ke-137 dan ke-138 telah dihapuskan.

Penghapusan denda tersebut menjadi bagian dari langkah dan bentuk tanggung jawab pengelola atas kendala yang terjadi dalam proses pengembalian toga dan uang jaminan. Dengan demikian, keterlambatan yang terjadi

tidak semakin membebani para wisudawan yang masih dalam proses menyelesaikan pengembalian toga.

Aiyen menegaskan, Untad memahami keluhan lulusan dan memastikan persoalan tersebut segera teratasi. Permasalahannya ini kata dia, akan menjadi evaluasi agar ke depan tidak terjadi kendala serupa dalam tata kelola penyewaan toga.

“Untad juga akan mengevaluasi mekanisme pengelolaan toga dan uang jaminan. Evaluasi dilakukan agar proses pengembalian pada pelaksanaan wisuda berikutnya dapat berjalan lebih baik,” jelas Dr. Aiyen. Sementara itu, Dr. Lien Damayanti, SP, MP, selaku Pengelola Pengembalian Toga Untad, menyampaikan permohonan maaf kepada wisudawan angkatan 137 dan 138 atas keterlambatan pengembalian dana jaminan toga.

“Saya mewakili pengelola penyewaan toga di Universitas Tadulako menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada wisudawan angkatan 137 dan 138 atas keterlambatan pengembalian dana jaminan,” ujar Dr. Lien. Menurutnya, keterlambatan

tersebut terjadi karena kendala administrasi dan sistem manajemen yang kurang efektif akibat pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dalam waktu berdekatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat dari pihak pengelola untuk menunda ataupun mengambil dana jaminan tersebut.

“Kalau permasalahan kami menunda atau mengambil uang itu sama sekali tidak ada, karena pada pelaksanaan wisuda sebelum-sebelumnya semua proses pengembalian toga dan uang jaminan berjalan dengan lancar. Harapan kami, hal ini tidak akan terulang lagi dan kami dari pihak pengelola akan memperbaiki pengelolaannya yang lebih baik lagi sehingga hal seperti ini tidak terjadi kembali,” jelasnya.

Dr. Lien juga menegaskan komitmen pihak pengelola untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola pengembalian toga dan dana jaminan agar proses ke depan dapat berjalan lebih baik serta tidak menimbulkan kendala serupa.

“Sekali lagi kami dari pengelola penyewaan toga memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya. **ENG**

Tim Riset SDM FEB Unismuh Palu Gandeng Peserta KKN Riset Kondisi Masyarakat

SULTENG RAYA-Tim Riset Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu menggandeng mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 70 dalam melakukan riset di masyarakat, salah satunya di Kabupaten Parigi Moutong.

Data hasil temuan mahasiswa peserta KKN saat observasi dijadikan bahan untuk melakukan riset turun ke lapangan, seperti yang terjadi di SD Kecil Desa Toraranga. Sebagai SD Kecil yang memiliki sekolah induk SDN, tenaga pengajar atau gurunya kerap kali di roling. Belum lagi gaji kerap mengalami keterlambatan pembayaran.

Temuan tersebut jadi bahan riset oleh enam orang Tim Riset SDM yang dipimpin (Ketua) Dr. Abdul Rahman, SE., MM dengan anggota Dr. Rahmiwati Habibu, SE., MM, Dr. Rukhayati, SE., MM, Awaludin, SE., MM,

Abd. Kadir, SE., MM, dan Mutmainah, SE., MM dalam hal Sumber Daya Manusia, khususnya tingkat stres dan tingkat motivasinya. Abdul Rahman menyampaikan pengelolaan stres dan tingkat motivasi menjadi bagian dalam risetnya, mengingat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan proses belajar mengajar di dalam kelas yang setiap hari berhadapan dengan peserta didiknya.

“Kita tau mereka ini gerap di roling dan gajinya kerap juga terlambat, nah tentu dari dua itu secara manusiawi pasti mempengaruhi psikologinya, tingkat stres

dan sebagainya, inilah yang kita riset,” ujarnya, Rabu (26/8/2026).

Saat ini timnya masih terus melakukan proses riset, dimana hasil dari riset ini selain akan keluar sebagai jurnal akan menjadi bahan ajar, buku referensi dan sebagainya, bahkan sampai pada tahapan HAKI. Selain itu, juga bisa dikembangkan oleh tim riset lainnya. “Kita ini ada beberapa tim berdasarkan keilmuan, ada SDM, Keuangan, Pemasaran dan sebagainya, hasil riset ini bisa dikembangkan berdasarkan keilmuan masing-masing,” jelas Abdul Rahman. Katanya, Tim riset ini tidak hanya berfokus di satu kasus melainkan akan terus turun ke masyarakat melakukan riset melakukan pemetaan masalah lalu mendiskusikan di dalam kampus bersama timnya bahkan menggandeng tim riset lain untuk mengurai dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. **ENG**



TIM Riset SDM FEB Unismuh Palu foto bersama dengan peserta KKN Angkatan 70 di lokasi KKN. **FOTO: AMILUDDIN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU



Dr. Indah Ahdlah, S.Sos., M.Si
Ketua BPH



Prof. Dr. H. Rajindra Rum, SE., MM
Rektor



Dr. Sudirman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I



Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II



Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Wark III



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Wark IV

Unismuh Palu Monev KKN Angkatan 70 di Parigi



KETUA LPPM Unismuh Palu, Dr. Rukhayati, SE., MM saat memberikan pengarahan pada Monev KKN Angkatan 70 di Kabupaten Parigi, Rabu (26/8/2026). **FOTO: AMILUDDIN**

SULTENG RAYA-Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) kembali melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 70 Tahun 2026, kali ini dilaksanakan di Kabupaten Parigi.

Pelaksanaan Monev kali ini dipimpin langsung Ketua LPPM Unismuh Palu, Dr. Rukhayati, SE., MM didampingi Ketua Panitia KKN Angkatan 70, Moh. Afief Bubayyin, SE., ME dan sejumlah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) diantaranya Dr. Imam Basofi Usman, SH., MH, Nurmiati, S.Pd., M.Pd, Kuliawati, S.Pd., M.Pd.I, Dr. Abd Rahman,

SE., MM dan Awaludin, SE., MM.

Selain itu turut mendampingi Ketua Pengelolah Kampus III Unismuh Palu Parigi Drs. Hamja Dg Majaja. MM dan Kepala SMK Muhammadiyah Parigi, Resminto, S.Pd.

Di kabupaten ini terdapat 10 posko tersebar di beberapa kecamatan masing-masing Posko Kampus

III Unismuh Palu Parigi, Sakina Jaya, Toboli, Avolua, Toboli Barat, Pangli, Tandaigi, Toraranga, Siniu, dan Toera.

Ketua LPPM Unismuh Palu, Dr. Rukhayati saat membuka monev tersebut menyampaikan salam dari Rektor Unismuh Palu Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM yang tidak berkesempatan hadir karena ada agenda yang tidak kalah penting yang harus diikuti oleh rektor.

“Salam dari Pak Rektor yang tidak berkesempatan kebersama kita semua kali ini, sebenarnya Pak Rektor ingin sekali kebersama kita di sini, namun ada agenda yang tidak kalah pentingnya yang meng-

haruskan beliau hadir di kegiatan itu, sehingga belum sempat kebersama kita kali ini, semoga agenda berikutnya beliau bisa kebersama kita lagi,” urai Rukhayati.

Ia juga mengingatkan kepada peserta KKN, sebagaimana saat pembekalan telah disampaikan jika realisasi program kerja saat pelaksanaan monev itu minimal telah terealisasi 50 persen. “Monev minimal 50 persen capaian, sebagaimana disampaikan saat pembekalan. Dan saat seminar akhir dan penarikan sudah 100 persen. Jangan meninggalkan utang program kerja,” ujar Rukhayati.

Sementara itu, Ketua Pengelolah Kampus III Unismuh Palu Parigi Hamja Dg Majaja menyampaikan

rasa syukur dengan adanya pelaksanaan KKN, karena melalui program itu ada potensi perubahan kondisi sosial masyarakat sebagaimana peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

Katanya, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tenaga, pengetahuan, dan pemikiran kritis untuk mendorong perbaikan di tengah masyarakat.

Di tempat tersebut, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Parigi ini juga mengusulkan Desa Sakinah Jaya dapat dijadikan sebagai desa binaan Universitas Muhammadiyah Palu, dengan pertimbangan di desa itu terdapat potensi wisata yang sangat menjanjikan jika terkelolah dengan baik karena memiliki Air Terjun, selain itu juga terd-

apat perkebunan Milik Persekutuan Muhammadiyah.

Keduanya dinilai dapat dijadikan sebagai tempat riset dan pengabdian. “Di sana ada potensi wisata berupa air terjun, serta di sana ada perkebunan milik Muhammadiyah,” ujarnya.

Sebagaimana biasanya saat pelaksanaan monev, masing-masing perwakilan posko menyampaikan pemaparan realisasi pelaksanaan setiap item program kerja, dalam pemaparan tersebut telah tergambarkan jika program kerja masing-masing posko telah mencapai diatas 50 persen.

Hanya saja masih terdapat sejumlah catatan yang disampaikan oleh Tim Monev yang harus ditindaklanjuti oleh setiap posko dengan memanfaatkan sisa waktu

yang ada.

Afief selaku Ketua Panitia KKN Angkatan 70 Tahun 2026 menekankan penambahan program non fisik pada setiap posko seperti pembuatan briket, dompet digital atau qris pada pengelolah UMKM serta pemberdaaan masyarakat berkaitan dengan kearifan lokal dengan sasaran masyarakat.

Sementara itu, salah satu DPL Rahman juga menyerahkan kepada mahasiswa KKN agar ikut pembantu pendataan aset Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Parigi.

“Silahkan bangun koordinasi dengan PDM dan PDA Parigi, karena saat ini ada pendaatan aset, sekaligus ikut serta pengajian sebagai program AIK,” pesannya. **ENG**

